

KAJIAN IMPLEMENTASI *E-LEARNING* (STUDI PADA UNIVERSITAS TERBUKA)

Anita Tri Widiyawati¹, Aulia Puspaning Galih², Lestari Eko Wahyudi³

Dosen Universitas Brawijaya

¹anitatriwidiyawati@gmail.com/anitatriw@ub.ac.id

²auliapuspa@ub.ac.id

³lestarielow@gmail.com

Abstrak

Permasalahan kurang aktifnya mahasiswa Universitas Terbuka dalam proses pembelajaran dengan menggunakan *e-learning*, permasalahan pendidikan karakter yang sangat sulit diterapkan pada pembelajaran *online* (*e-learning*) menjadi isu strategis yang butuh pengkajian. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini layak untuk dilakukan. Terkait dengan bagaimana implementasi *e-learning* dan pencarian model *e-learning* yang bisa menjawab permasalahan yang muncul dalam implementasi *e-learning* yang didasarkan pada teori dan tujuan sistem pendidikan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi *e-learning* di Universitas Terbuka dan penemuan model *e-learning* baru yang menjadi solusi atas permasalahan yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed methods. Adapun hasil penelitian menunjukkan implementasi *e-learning* Universitas Terbuka yaitu siapa yang mengimplementasikan dalam kategori jelas, sehingga kebijakan dan perencanaan juga dalam kategori baik, hakekat dari proses administrasi dalam kategori baik, kepatuhan dalam kategori baik, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah positif. *E-learning* Universitas Terbuka menggunakan moodle (*modular object-oriented dynamic learning environment*). Moodle ini semacam paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang menggunakan prinsip *social constructionist pedagogy*. Sedangkan untuk model *e-learning* Universitas Terbuka memenuhi empat karakteristik model *e-learning* yang efektif. Empat karakteristik tersebut yaitu: (1) *Interactivity* (Interaktivitas), (2) *Independency* (Kemandirian), (3) *Accessibility* (Aksesibilitas), dan (4) *Enrichment* (Pengayaan). Berdasarkan hasil kajian, dibutuhkan pengembangan model sistem PJJ (*distance learning*) dan pendukung sistem pembelajaran konvensional dengan menggunakan *e-learning* yang efektif dan efisien.

Kata kunci: implementasi *e-learning*, model *e-learning*, Universitas Terbuka

Pendahuluan

Pannen, dkk (2016:6) menyebutkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ), yang dipersepsikan sebagai inovasi abad 21, merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkauan luas, lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi. Sistem PJJ membuka akses terhadap

pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik tersebut, sistem PJJ seringkali dianggap sebagai solusi terhadap berbagai masalah pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan demokratisasi pendidikan, serta perluasan akses terhadap pendidikan

berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai perangkat hukum yang telah dikeluarkan pemerintah, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sistem PJJ sudah menjadi bagian yang menyatu dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan. Situasi ini membuka kesempatan dan peluang bagi berbagai institusi pendidikan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam PJJ.

Dalam perkembangannya, sistem PJJ mengambil manfaat besar dari perkembangan media dan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan akan pendidikan secara massal dan luas. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan model pendidikan jarak jauh yang fleksibel dan cerdas, mampu membuka akses pendidikan bagi siapa saja melintasi batas ruang dan waktu, serta mengatasi berbagai kendala sosio ekonomis (Pannen, dkk., 2016:6). Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan di mana saja berbasis TIK (Pannen, dkk., 2016:9). Berdasarkan hal ini, setiap institusi

pendidikan tinggi berlomba-lomba untuk memberikan akses *e-learning* dalam proses pembelajaran. Begitu juga Universitas Terbuka yang berusaha memberikan pembelajaran terbaik dengan memanfaatkan *e-learning* dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Universitas Terbuka (UT) menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio, dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa Universitas Terbuka harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat).

E-learning Universitas Terbuka masuk pada jenis *e-learning* sebagai *distance learning* (PJJ). *E-learning* tersebut perlu diketahui sejauh mana implementasinya. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian ini layak untuk dilakukan. Terkait dengan bagaimana implementasi *e-learning* dan pencarian model *e-learning* yang bisa menjawab permasalahan yang muncul dalam implementasi *e-learning* yang didasarkan pada teori dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pada dasarnya sistem pembelajaran menggunakan *e-learning* merupakan sistem pembelajaran yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Akan tetapi, pada implementasinya banyak hal yang perlu dikaji sehingga sistem ini benar-benar bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan menemukan model yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi *e-learning* di Universitas Terbuka? Dan (2) Bagaimanakah model *e-learning* yang efektif dan efisien?

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson dalam bukunya Abdul Wahab, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Siapa yang mengimplementasikan
 2. Hakekat dari proses administrasi
 3. Kepatuhan, dan
 4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan (Abdul Wahab, 1991: 45).
- Sementara itu menurut Ripley & Franklin (1986) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan What's happening? (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "what's happening" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. Guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi, antara lain model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan

fungsi dari tiga variabel, yaitu 1) Karakteristik masalah, 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, 3) Faktor-faktor di luar peraturan (Wibawa, 1994: 25).

2. Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

a. Fungsi dan Tujuan Sistem Pendidikan Jarak Jauh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pernyataan ini dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 31 ayat (2) tentang Pendidikan Tinggi bahwa selain untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, pendidikan jarak jauh bertujuan untuk memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (pasal 118 ayat 1) menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Senada dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, pada pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan jarak jauh bertujuan

untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh harus sejalan dengan fungsi dan tujuan yang telah diformulasikan dalam perundangan yang berlaku, yakni untuk memperluas dan meratakan akses pendidikan yang bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Akses, Pemerataan, dan Kualitas

Secara umum, prinsip penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan, dan kualitas. Ketiga prinsip tersebut mendasari diselenggarakannya pendidikan jarak jauh seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku.

1. Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Peningkatan dan perluasan akses ini didasarkan pada tujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan secara masal kepada peserta didik. Secara khusus, TIK yang berkembang pesat dapat mendukung sistem PJJ untuk meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi anggota masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.

2. Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan dan layanan pendidikan khusus secara inklusif, bagi siapapun tanpa pengecualian.

Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel, lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan keterjaminan pendidikan, menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

3. Kualitas

Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan memanfaatkan TIK. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk mengembangkan materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar yang bersifat terbuka dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

3. *E-learning*

a. Definisi *E-learning*

Rosenberg (2001: 28) menyatakan “*E-learning* refers to the use of internet technologies to deliver a broad array of solution that enhance knowledge and performance.”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa *e-learning* mengacu pada penggunaan teknologi internet untuk memberikan solusi yang luas demi meningkatkan pengetahuan dan kinerja.

Menurut Darmawan (2015: 12) menyebut bahwa *e-learning* pada hakikatnya adalah bentuk pembelajaran konvensional yang dituangkan dalam format digital dan disajikan melalui teknologi informasi. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, maka *e-learning* juga dapat diartikan sebagai singkatan dari *Electronic Learning*, atau dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik maksudnya adalah sistem pembelajaran yang berbasis perangkat/media elektronik.

b. Karakteristik *E-learning*

Rusman dkk (2015: 264) menyebutkan empat karakteristik *e-learning* sebagai berikut:

1. *Interactivity* (Interaktivitas); tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung (synchronous), seperti *chatting* atau *messenger* atau tidak langsung (asynchronous), seperti forum, mailing list atau buku tamu.
2. *Independency* (Kemandirian); fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa (student-centered learning).
3. *Accessibility* (Aksesibilitas); sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional.

4. *Enrichment* (Pengayaan); kegiatan pembelajaran, presentasi materi kuliah dan materi pelatihan sebagai pengayaan, memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti *video streaming*, simulasi dan animasi.

Metode Penelitian

Mixed methods digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Mixed methods adalah rancangan penelitian yang dilakukan dengan asumsi dan metode penelitian yang menyatukan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada menggunakan hanya satu pendekatan (Creswell, 2013).

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data berupa angka untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kuesioner sebagai cara untuk pengumpulan datanya. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data berupa opini partisipan agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dengan metode wawancara. Pada penelitian ini akan dikumpulkan dulu data kuantitatif, hasilnya dikoding dan dianalisis, baru kemudian dari hasil data kuantitatif tersebut dilanjutkan ke pencarian data kualitatif untuk menguatkan hasil data kuantitatif sekaligus mencari fakta yang tidak bisa didapatkan hanya melalui kuesioner. *E-learning Universitas Terbuka* (e-learning.ut.ac.id) merupakan lokasi pada penelitian ini.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah *mixed methods*, maka metode pengambilan

data dilakukan untuk mendapatkan data berupa angka dan opini pribadi dari partisipan penelitian. Untuk mendapatkan data kuantitatif, digunakan metode survey dan observasi, sedangkan untuk mendapatkan data kualitatif, digunakan metode pengumpulan data wawancara dan focus group discussion (FGD). Sedangkan metode analisis datanya menggunakan dua jenis analisis data, yang pertama adalah analisis data statistik dan analisis data non-statistik. Analisis data statistik digunakan untuk data kuantitatif yang berupa angka. Data ini akan diolah menggunakan SPSS untuk memaparkan keadaan yang sebenarnya dari sampel penelitian. Sedangkan analisis data non-statistik digunakan untuk mengolah data yang bukan berupa angka. Data akan dianalisis substansinya. Data kualitatif akan dianalisis dengan beberapa aktivitas, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* atau *verification*. Sedangkan data kuantitatif akan dikoding terlebih dahulu, diuji validitas dan reabilitasnya, penyajian data dan analisis data.

Pembahasan

Data Demografis Responden

Dalam penelitian kuantitatif diperlukan adanya pertanyaan mengenai data diri responden atau biasa yang disebut data demografis. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengetahui dengan tepat penyebaran kuesioner sehingga data yang didapat tidak bias. Di dalam penelitian ini data yang ditanyakan kepada responden adalah data mengenai usia, pekerjaan, dan asal universitas.

Tabel 1 Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
17-26	52	52
27-36	29	29
37-46	12	12
≥47	7	7

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berada pada kisaran usia 17-26 tahun, totalnya sebanyak 52%. Sebesar 29% responden berusia antara 27-36 tahun. Sisanya sebanyak 12% dan 7% berada pada kisaran usia 37-46 tahun dan berusia 47 tahun ke atas. Apabila dikaitkan dengan tabel di bawah ini, yaitu tabel 2, maka sangatlah wajar apabila lebih dari lima puluh persen responden berusia muda.

Tabel 2 Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Dosen	41	41
Mahasiswa	59	59

Tabel 2 menyajikan data mengenai pekerjaan responden. Peneliti hanya membuat dua opsi karena subyek penelitian ini adalah pengguna *e-learning* Universitas Terbuka, yaitu dosen dan mahasiswa. Sebesar 59% dari responden adalah mahasiswa, sedangkan sisanya sebanyak 41% adalah dosen.

Tabel 3 Asal Universitas Responden

Asal Universitas	Frekuensi	Persentase
Universitas Terbuka	50	50

Tabel 3 menyajikan hasil data demografis mengenai asal universitas responden pada penelitian ini. Responden dari Universitas Terbuka berjumlah 50 agar mendapatkan data yang seimbang antara pengguna *e-learning* untuk penelitian ini.

Kuesioner penelitian ini berisi mengenai pendapat responden mengenai implementasi *e-learning* pada Universitas Terbuka. Semua tanggapan dinyatakan dalam skala Likert 7 poin.

1. Implementasi *E-learning* Universitas Terbuka

Pada bagian satu kuesioner yang membahas mengenai implementasi *e-learning* Universitas terbuka, peneliti membuat 13 pertanyaan yang mendetail. Pengkodean item pertanyaan kuesioner pada bagian ini adalah I1-I13. Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa pendaftaran *e-learning* untuk mahasiswa dan dosen di Universitas Terbuka mudah dilakukan.

Nilai mean tertinggi (6.24) dari hasil kuesioner yang disebarkan pada Universitas Terbuka adalah pada item pertanyaan (I2) yang membahas mengenai kemudahan pendaftaran *e-learning*. Sedangkan nilai mean terendah (4.48) dihasilkan dari item pertanyaan (I4) membahas tentang keberadaan staf yang membantu penggunaan *e-learning*. Hal ini berarti bahwa meskipun proses pendaftaran dan penggunaan *e-learning* dirasakan mudah di Universitas Terbuka tetapi kesigapan staf dianggap kurang oleh responden.

Tabel 4. Implementasi *E-learning* Universitas Terbuka

Item Pertanyaan	Asal Universitas	N	Mean	Nilai p
I1	UT	50	5.74	.637
I2	UT	50	6.24	.038
I3	UT	50	5.80	.337
I4	UT	50	4.48	.685
I5	UT	50	5.16	.683
I6	UT	50	5.12	.838
I7	UT	50	5.88	.080
I8	UT	50	5.76	.464
I9	UT	50	5.54	.181
I10	UT	50	4.56	.808
I11	UT	50	4.74	.337
I12	UT	50	4.96	.579
I13	UT	50	5.60	.472

A. Siapa yang Mengimplementasikan

Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi, dan data dokumen menunjukkan bahwa siapa yang mengimplementasikan *e-learning* adalah UT Pusat di bawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik. Terdapat kebijakan yang telah ditentukan terkait pelaksanaan tutor, baik kewajiban tutor maupun mahasiswa yang mengikuti tutor. Rekrutmen tutor juga sangat jelas.

Terdapat standar kompetensi khusus yang harus dipenuhi melalui pelatihan selama 2 minggu. Terkait dengan gaji pun terstandarkan. UPBJJ bertindak sebagai tangan panjang dari UT Pusat. Maka semuanya terpusat pada UT Pusat, sehingga tidak ada *double policy*. Semua sistem teintegrasi dengan baik. Walaupun terdapat beberapa kendala, akan tetapi UT Pusat selalu berusaha dengan sigap dan

terarah serta terencana dengan baik dalam mengatasi kendala tersebut melalui media-media yang sudah ditentukan sebelumnya. Evaluasi terhadap kebijakan ataupun aturan terus dilakukan setiap tahun. Evaluasi terhadap sistem *e-learning* juga terus dilakukan setiap tahun, bahkan setiap semester.

B. Hakekat dari Proses Administrasi

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan tutor pada saat kegiatan tuton dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan terdapat aturan yang ketat yang diberlakukan oleh UT Pusat terkait dengan sanksi bagi tutor yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan kepatuhan mahasiswa masih dinilai sangat kurang. Banyak mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan tuton. Berdasarkan permasalahan ini, maka UT Pusat melalui wewenang Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan kebijakan baru (*DEACTIVASI MAHASISWA DALAM TUTON*) mahasiswa peserta Tuton yang tidak pernah mengikuti Tuton tiga minggu berturut-turut (minggu ke-1 hingga minggu ke-3, maka: kesertaannya dalam Tuton pada inisiasi minggu ke-4 akan dinonaktifkan, mahasiswa tersebut tidak akan mengikuti tuton hingga akhir semester.

C. Kepatuhan

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan tutor pada saat kegiatan

tuton dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan terdapat aturan yang ketat yang diberlakukan oleh UT Pusat terkait dengan sanksi bagi tutor yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan kepatuhan mahasiswa masih dinilai sangat kurang. Banyak mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan tuton. Berdasarkan permasalahan ini, maka UT Pusat melalui wewenang Wakil Rektor Bidang Akademik mengeluarkan kebijakan baru (*DEACTIVASI MAHASISWA DALAM TUTON*) mahasiswa peserta Tuton yang tidak pernah mengikuti Tuton tiga minggu berturut-turut (minggu ke-1 hingga minggu ke-3, maka: kesertaannya dalam Tuton pada inisiasi minggu ke-4 akan dinonaktifkan, mahasiswa tersebut tidak akan mengikuti tuton hingga akhir semester.

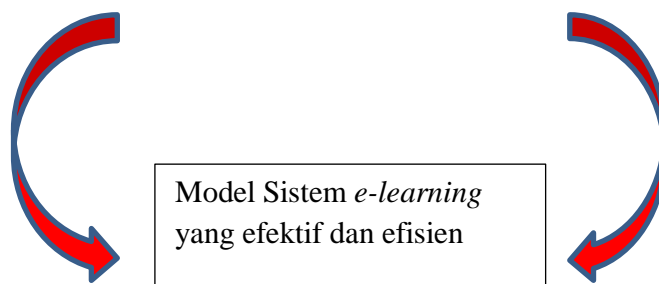
D. Dampak dari Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak dari diberlakukannya kebijakan terkait *e-learning* sangat baik, baik bagi tutor maupun mahasiswa. Tutor merasa dipermudah dalam proses belajar-mengajar, sedangkan mahasiswa merasa mendapatkan kesempatan untuk kuliah tanpa harus mengganggu kegiatannya melalui *e-learning*. Pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dapat bertemu dengan mahasiswa lain setiap saat pada forum diskusi membuat mahasiswa merasa dimudahkan dalam akses untuk belajar.

2. Model Sistem PJJ (distance learning) dan pendukung sistem pembelajaran konvensional dengan menggunakan *e-learning* yang efektif dan efisien.

INDIKATOR YANG HARUS TERPENUHI				
Kebijakan	Berdasar pada implementasi kebijakan pendidikan: 1. Siapa yang mengimplementasikan 2. Hakekat dari proses administrasi 3. Kepatuhan 4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan			
Manajerial	<i>Planning</i> (Perencanaan)	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	<i>Actuating</i>	<i>Controlling</i>

			(Pelaksanaan)	(Pengawasan)
Indikator karakteristik model <i>e-learning</i>	<i>Interactivity</i> (Interaktivitas)	<i>Independency</i> (Kemandirian)	<i>Accessibility</i> (Aksesibilitas)	<i>Enrichment</i> (Pengayaan)
Literasi media <i>e-learning</i>	Dosen		Mahasiswa	



Kesimpulan

Hasil kajian implementasi *e-learning* pada Universitas Terbuka adalah:

- 1) Siapa yang mengimplementasikan dalam kategori jelas, sehingga kebijakan dan perencanaan juga dalam kategori baik.
- 2) Hakekat dari proses administrasi dalam kategori baik.
- 3) Kepatuhan dalam kategori baik.
- 4) Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah positif.

Terkait hasil dari kajian implementasi ini dibutuhkan pengembangan model sistem PJJ (*distance learning*) dan pendukung sistem pembelajaran konvensional dengan menggunakan *e-learning* yang efektif dan efisien.

Saran

Temuan pada penelitian ini dibutuhkan oleh pengambil kebijakan pada perguruan tinggi baik swasta maupun negeri terkait pembelajaran menggunakan *e-learning* baik sebagai *distance learning* maupun sebagai pendukung dalam pembelajaran konvensional.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 1991. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke*

implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Creswell, J. W. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications, Incorporated.

Darmawan, D. 2015. *Teknologi pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pannen, Paulina, dkk. 2016. *Panduan Pelaksanaan PJJ 2016 Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: RISTEKDIKTI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. *Policy Implementation Bureaucracy*. Chicago: Dorsey Press.

Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana. 2015. *Pembelajaran berbasis teknologi informasidan*

- komunikasi: Mengembangkan profesionalitas guru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosenberg, M.J. 2001. *E-learning*: Strategi for delivering knowledge in the digital age. USA: McGraw-Hill.
- Samodra, Wibawa. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,